

BAB I

PERAN IPU (INTER PARLIAMENTARY UNION) DALAM UPAYA MENYELESAIKAN MASALAH-MASALAH TRANSNASIONAL

Pada Bab I ini, penyusun akan menjelaskan tentang garis besar penulisan skripsi secara metodologis yang terbagi kedalam beberapa bagian, yaitu : alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, latar belakang masalah; rumusan masalah; kerangka berfikir; hipotesa; jangkauan penelitian; metode pengumpulan data; dan sistematika penulisan.

A. Alasan Pemilihan Judul

Penyusun mendapatkan ide untuk mengangkat tema ini karena penyusun tertarik untuk mengetahui akan keberadaan organisasi internasional ini (IPU) di dunia internasional. Komponen anggota yang dimiliki organisasi IPU ini terdiri dari anggota parlemen di setiap negara dan jumlah anggotanya yang hampir sama dengan jumlah anggota PBB membuat penyusun menganggap organisasi ini sangat besar tapi sangat jarang didengar di telinga penyusun. Karena alasan inilah penyusun memilih judul ini sebagai judul skripsinya.

Dalam era globalisasi yang tengah kita jalani saat ini, hampir tidak ada lagi negara yang dapat berdiri sendiri dan menutup diri dari situasi dan

kondisi yang terjadi di negara lain. Dengan kata lain setiap negara hidup dalam situasi yang saling tergantung satu dengan lainnya (*era of interdependence*) karena kemajuan telekomunikasi dan semakin baiknya sistem transportasi telah membuat dunia menjadi semakin sempit sehingga jarak antara satu negara dengan negara lainnya hampir tidak ada. Dunia berubah menjadi satu kampung besar atau *a global village*.¹

Ikatan ketergantungan juga terjadi antara generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Dalam kondisi yang seperti ini masalah sosial yang terjadi di satu negara akan cepat berkembang dan meluas ke negara-negara lain. Kondisi ini juga semakin diperburuk dengan masih kuatnya faktor-faktor penting yang menyebabkan terjadinya masalah transnasional dan celah bagi munculnya tindak kekerasan, yaitu kemiskinan, pelanggaran HAM dan keterbelakangan pembangunan². Dengan situasi sekarang ini masalah sosial di satu negara dengan cepat berpindah dan menyebar ke negara-negara lain sehingga akhirnya menjadi problem internasional.

Secara umum dapat dikatakan bahwa suatu kondisi mulai menjadi masalah sosial di saat masyarakat memutuskan bahwa mereka memerlukan perubahan yang menuju kepada kebaikan. Perbaikan kearah yang diinginkan

¹ Robert O. Keohane and Joseph S. Nye, *Power and Independence*, Second Edition, Harper Collins Publisher, Harvard, 1989, hal.3.

² Boutros Boutros-Ghali, *Building Peace And Development 1994, Annual Report On The Work Of The Organization*, United Nations, NY, 1994, hal.113.

tersebut hanya akan tercapai melalui usaha bersama. Dalam kondisi dimana wilayah territorial negara terhapus oleh peran aktor-aktor non territorial, yang salah satunya adalah organisasi internasional, akan menimbulkan *interdependence* yang semakin kuat dalam mempengaruhi situasi politik internasional.

Setiap kebijakan yang dibuat suatu negara sedikit banyak juga akan mempengaruhi kondisi di negara lain. Maka untuk menanggulangi masalah tersebut perlu digalang suatu kerjasama internasional, yang tidak hanya melibatkan pemerintah tetapi juga seluruh lapisan masyarakat, termasuk juga lembaga legislatif atau parlemen.

Dalam kapasitasnya sebagai sebuah organisasi parlemen sedunia, IPU atau Persatuan Parlemen Sedunia, seharusnya dapat berperan lebih aktif untuk menuntaskan masalah transnasional ini. Kerjasama parlemen sedunia ini masih sangat diperlukan untuk menanggulangi masalah transnasional terutama sebagai pendukung utama kebijakan pemerintah.

IPU sebagai sebuah organisasi internasional bukan merupakan sumber hukum secara definitif tetapi lebih kepada *institutionalized policy networks*³, di mana parlemen dari berbagai negara dapat saling bekerjasama dan mengkoordinasikan kebijakan yang mereka buat mengenai penanganan

³ Charles Carstairs and Richard Ware, *Parliament and International Relations*, Open University Press, Philadelphia, 1991, hal.256.

suatu masalah. Selain itu kekuatan IPU juga sangat tergantung dari kekuatan politik yang dimiliki parlemen di masing-masing negara⁴.

Meningkatnya masalah-masalah sosial transnasional memang cukup meresahkan. Diantara sekian banyak masalah sosial transnasional yang terjadi seperti, keamanan negara, pembangunan, kemanusiaan, globalisasi, lingkungan hidup, demokratisasi, HAM, dan gender, penyusun mengangkat masalah terorisme internasional, perdagangan gelap obat-obat terlarang, imigran ilegal, dan epidemi HIV/AIDS karena masih perlu mendapat perhatian yang lebih besar dari IPU karena masalah transnasional tersebut masih banyak dialami di berbagai negara.

Dengan penjelasan diatas maka penyusun memilih judul "Peran IPU (*Inter Parliamentary Union*) Dalam Upaya Menyelesaikan Masalah-Masalah Transnasional" sebagai judul untuk penulisan skripsi ini.

B. Tujuan Penulisan

Tujuan penulis memfokuskan penelitian ini kepada "Peran IPU dalam upaya menyelesaikan masalah-masalah Transnasional" adalah sebagai berikut :

⁴ *Ibid*, hal.37

1. Mengetahui peran strategis IPU dalam upaya menyelesaikan masalah transnasional tersebut.
2. Mengetahui resolusi-resolusi yang dihasilkan IPU terkait upaya menyelesaikan masalah-masalah transnasional tersebut

C. Latar Belakang Masalah

Situasi keamanan dunia sekarang ini menunjukkan kondisi yang semakin memprihatinkan di mana sumber-sumber instabilitas keamanan yang dimaksud semakin beragam dan kompleks secara transnasional. Sejumlah masalah transnasional tersebut kini semakin menjadi sebuah ancaman stabilitas bagi keamanan dunia dan untuk mengatasinya diharuskan dibentuknya suatu kerja sama internasional demi terciptanya perdamaian dunia.

Dari masalah HAM, kemanusiaan, demokrasi, pembangunan keamanan, gender, terorisme, penyebaran obat-obatan terlarang, imigran gelap serta epidemi HIV/AIDS tidak luput dari perhatian IPU. Banyaknya masalah tersebut dikarenakan sistem dunia yang setiap saat mengalami perubahan yang signifikan, dimana masalah-masalah transnasional tersebut tidak memandang suatu negara, baik negara maju, negara berkembang atau negara miskin sekalipun.

Transnasional berarti lintas batas teritorial, dimana setiap negara mempunyai batas teritorial dari masing-masing wilayah mereka. Setiap negara berhak untuk mempertahankan masing-masing wilayah teritorialnya dari ancaman yang berasal dari luar wilayah kedaulatannya.

Terlepas dari usaha untuk menjaga wilayahnya, tidak dapat dipungkiri lagi bahwasanya setiap negara rentan akan ancaman yang berasal dari kelompok kepentingan atau bahkan negara lain. Masalah transnasional ini menjadi penting untuk dicari jalan keluarnya karena selama ini masalah transnasional merupakan persoalan yang belum terpecahkan baik di negara berkembang maupun negara maju.

Diantara sekian banyak masalah transnasional menjadi perhatian IPU, penyusun menganggap terorisme internasional, perdagangan gelap obat-obat terlarang, imigran gelap illegal dan epidemi HIV/AIDS sebagai masalah yang banyak dihadapi oleh berbagai negara. Baik itu di negara maju maupun di negara berkembang. Umumnya masalah transnasional ini akan mudah masuk melalui lintas batas teritorial yang dapat dilalui dengan berbagai cara, seperti penyelundupan, memanfaatkan kelengahan patroli laut, dll.

Pada kenyataannya di beberapa negara, masalah transnasional ini menjadi pelik dan berkepanjangan ketika negara tidak mampu untuk meminimalisir keadaan untuk mengatasi masalah transnasional tersebut, atau

bahkan masalah ini akan menjadi ancaman ketika negara tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mengatasinya.

IPU diperlukan agar setiap anggota parlemen di masing-masing negara mempunyai peran untuk memberikan solusi dengan membicarakan bersama-sama dengan pemerintah untuk mengambil kebijakan yang relevan dengan masalah transnasional yang dihadapi. Sehingga nantinya pemerintah mendapatkan gambaran tentang langkah-langkah apa saja yang harusnya dilakukan untuk mengatasi masalah transnasional tersebut.

Dalam tiga dekade setelah Perang Dunia II kebanyakan organisasi pembebasan nasional mempergunakan cara terorisme dalam usahanya mencapai gerakan kemerdekaan. Banyak kelompok teroris etnis juga terlibat dalam mempergunakan tehnik kekerasan ortodoks dan konvensional dalam usahanya mendirikan negara terpisah.

Beberapa organisasi teroris mengarahkan tindak kekerasan mereka terhadap diplomat asing, pejabat militer dan kaum milyuner yang dilakukan dengan keyakinan bahwa mereka berjuang untuk membebaskan negaranya dari dominasi asing atau neo-kolonialisme.

Sebagai contoh beberapa kelompok non-negara yang sangat terkenal dalam melakukan terorisme seperti Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) di Timur Tengah, Tentara Republik Irlandia (IRA) di Inggris, Kelompok-

kelompok gerilyawan di Guatemala dan gerakan Sandinista di Nikaragua yang pada akhirnya juga diakui keberadaannya oleh pemerintah dan terjun ke arena politik secara resmi.

Meskipun alasan mereka ketika melakukan gerakan terorisme itu berbeda-beda namun ada satu persamaan yang dimiliki oleh semua anggota teroris, yaitu mereka akan menghalalkan segala cara demi mewujudkan tujuan yang mereka cita-citakan. Hal ini akhirnya menjadi masalah ketika mereka membiayai kegiatan mereka seringkali cara yang ditempuh sangat merugikan masyarakat. Misalnya dengan melakukan perdagangan senjata, obat-obatan terlarang, penyanderaan, perampokan, penculikan dan berbagai aktifitas ilegal lainnya.

Meningkatnya gerakan terorisme ini juga akan mengganggu perkembangan dan pemasukan negara dari sektor industri pariwisata, karena masalah keamanan merupakan salah satu syarat utama bagi suatu industri pariwisata, atau bahkan bagi negara yang sumber devisanya bergantung pada sektor pariwisata.

Masalah transnasional berikutnya adalah imigran gelap yang banyak melanda negara-negara berkembang. Persaingan ekonomi, kebutuhan hidup yang tinggi serta tingkat pengangguran yang terus meningkat seringkali menjadi alasan masyarakat untuk mencari kehidupan yang lebih baik di negara

lain. Padahal sebenarnya mereka yang berniat untuk mencari penghidupan di negara lain akan sangat mungkin bukannya mendapat keuntungan bahkan sebaliknya mereka akan mendapatkan kerugian. Tingginya minat inilah yang menjadi peluang terjadinya penyelundupan manusia. Meningkatnya masalah imigran gelap ini jelas menimbulkan masalah dalam dunia internasional. Sebagai contoh, pada tahun 2000 lalu, hubungan bilateral antara Indonesia dan Australia sempat terganggu karena tuduhan yang dilontarkan Australia bahwa Indonesia yang telah menjadi negara transit bagi imigran gelap ke Australia.

Hal ini terbukti dengan tertangkapnya sekitar 2000 orang asal Timur Tengah yang mayoritas berasal dari Irak yang siap berangkat ke Australia di beberapa pantai kecil di daerah Jawa Barat.⁵ Kejadian ini tentunya dapat membuat renggang hubungan di kedua negara karena telah menyangkut kredibilitas atas batas-batas wilayah teritorial dari masing-masing negara.

Pertimbangan IPU dalam hal ini adalah hampir setiap tahun sekitar 45 hingga 50 juta orang melakukan migrasi dari negara berkembang ke negara maju. Umumnya mereka datang dengan kemampuan yang pas-pasan sehingga akan sulit untuk bersaing memperoleh pekerjaan dan akhirnya hanya menjadi pekerja kasar⁶.

⁵ *Suara Pembaharuan*, 30 April 2000, hal. 1

⁶ *ibid*

Masalah transnasional lainnya yang tidak boleh dipandang dengan sebelah mata oleh setiap negara adalah Epidemii HIV/AIDS yang juga menjadi fokus oleh IPU. Di negara berkembang, korban meninggal akibat HIV/AIDS ini umumnya berada pada usia produktif.

Penyebaran HIV/AIDS ini sebagian besar disebabkan hubungan seks yang tidak aman diantara pasangan heteroseksual dan penyalahgunaan jarum suntik dari obat-obatan terlarang.⁷ Faktor-faktor pendukung epidemi penyakit ini juga semakin meningkat di negara maju seiring dengan masalah peningkatan ketergantungan obat terlarang di Eropa dan Amerika Utara, dan meningkatnya jumlah homoseksual muda di Australia dan Amerika Serikat.

Wabah HIV/AIDS ini sangat menghambat cita-cita IPU untuk melaksanakan pembangunan sosial, terutama pembangunan sumber daya manusia yang berkelanjutan. Negara-negara berkembang sebagai pihak yang paling parah merasakan dampak dari meluasnya epidemi ini, mulai kesulitan melaksanakan pembangunan nasionalnya karena perhatian dan dana pemerintah banyak tersedot untuk menanggulangi masalah ini. Seperti yang terjadi di Afrika Selatan, Presidennya Thabo Mbeki menolak untuk membayar

⁷ ILO (*HIV/AIDS : A Threat to Decent Work, Productivity and Development*), *International Herald Tribune*, 8 Juni 2000

distribusi obat AZT (azidothymidin) ke negaranya. Karena menganggap terlalu mahal sedangkan hasilnya belum tentu efektif.⁸

Dengan serentetan permasalahan ini, tentunya setiap negara menginginkan adanya suatu jalan keluar untuk menanggulangi masalah transnasional ini. IPU sebagai salah satu organisasi internasional, berperan serta dalam memberikan resolusi-resolusi yang nantinya akan digunakan sebagai jalan keluar dalam mengatasi masalah-masalah transnasional tersebut.

IPU adalah sebuah organisasi yang sangat serius dan sudah memiliki hubungan konsultatif dengan PBB. Dengan anggota yang mencapai 148 negara, masalah dari anggota parlemen suatu negara dapat didengar oleh parlemen negara-negara lain. Apalagi peran parlemen dewasa ini menjadi semakin penting. Hal tersebut merupakan pengaruh yang besar bagi pemerintah negara-negara yang parlemennya menjadi anggota IPU. I

IPU yang beranggotakan anggota parlemen di setiap negaranya diharapkan mendukung upaya negara untuk bersama-sama menuntaskan masalah-masalah transnasional ini dengan resolusi-resolusi yang telah dibahas pada setiap pertemuannya yang mana nantinya pemerintah akan membantu dalam merealisasikannya.

⁸ *International Herald Tribune*, 25 April 2000, hal. 1

D. Rumusan Masalah

Bagaimana IPU (*Inter Parliamentary Union*) berperan dalam upaya menyelesaikan masalah-masalah transnasional ?

E. Kerangka Berpikir

1. Konsep Kerjasama Internasional

Suatu konsep adalah abstraksi yang mewakili suatu obyek, atau suatu fenomena tertentu⁹. Konsep ini merupakan "suatu alat komunikasi" / bahasa dalam kegiatan pemikiran sehingga hal ini diabstraksikan dari kesan ditangkap melalui melalui indera (*sense impression*) dan digunakan untuk menyampaikan dan mentransmisikan persepsi dan informasi.

Selanjutnya konsep ini merupakan kesepakatan masyarakat penggunaannya. Hubungan internasional merupakan abstraksi yang menggambarkan interaksi yang terjadi diantara aktor-aktor yang melampaui batas yuridiksi sebuah negara. Adapun konsep kerjasama internasional tersebut sudah dibayangkan oleh program PBB dan dicerminkan dalam berbagai perkembangan Hubungan Internasional modern :

"Hubungan internasional yang berdasarkan prinsip-prinsip piagam PBB dan Resolusi Majelis Umum PBB yang relevan cenderung memajukan perdamaian dan keamanan dengan memperkuat ikatan

⁹ Mohtar Mas'ood, *Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan Metodologi*, LPJES, Yogyakarta, 1990, hal.93

antar negara, menciptakan hubungan antar mereka yang saling menguntungkan dan efektifitas kerjasama itu dapat dijamin baik dengan penataan kembali. Disamping itu hubungan tersebut juga akan lebih lancar apabila dilakukan tidak hanya terbatas antara pihak pemerintah tetapi juga melibatkan semua sektor masyarakat”¹⁰

Dari namanya sudah jelas bahwa hakekat dari kerjasama internasional dapat dikembalikan pada hasrat untuk memadukan semua bangsa di dunia dalam suatu wadah yang mampu mempersatukan mereka dalam cita-cita bersama, dan menghindarkan desintegrasi internasional.¹¹

Dari pengertian di atas berkaitan dengan IPU sebagai persatuan parlemen sedunia menganggap akan pentingnya kerjasama internasional untuk membangun nilai solidaritas antar negara. Sehingga setiap negara mempunyai kepedulian dengan negara lain. Terutama terhadap negara yang sedang mendapat masalah di negaranya.

Sedangkan menurut K.J. Holsti mendefinisikan kerjasama internasional adalah¹² :

“sebagian besar transaksi atau interaksi negara dalam sistem internasional sekarang ini bersifat rutin dan hampir bebas dari konflik. Berbagai jenis masalah nasional, regional dan global

¹⁰Morgenthau, "Perserikatan Bangsa-Bangsa. Hubungan Antara Perlucutan Senjata dan Keamanan Internasional", New York, 1982, hal.86.

¹¹Dr. Budiono, Kusumohamidjojo, "HUBUNGAN INTERNASIONAL : Kerangka Studi Analisis, Bina Cipta, Bandung. 1986, Hal.93

¹² K. J. Holsti, "POLITIK INTERNASIONAL", Kerangka Untuk Analisis, Jilid 2, Erlangga, Jakarta, 1988, hal. 209

bermunculan dan memerlukan perhatian dari berbagai negara. Banyak kasus yang terjadi pemerintah saling berhubungan atau pembicaraan mengenai masalah yang dihadapi mengemukakan berbagai bukti teknis untuk menolong permasalahan tertentu, beberapa perjanjian yang memuaskan semua pihak, proses ini disebut kerjasama".

Proses kerjasama ini tercipta dikarenakan saling membutuhkan. Sifat tersebut terjadi baik pada sektor politik, ekonomi, sosial dan budaya. Akan tetapi sifat saling membutuhkan dan ketergantungan antar negara terjadi pula pada kerjasama di sektor-sektor yang rentan timbulnya masalah-masalah transnasional. Misalnya pada sektor pertahanan dan keamanan, kesehatan dan ketenagakerjaan.

Penting bagi setiap negara untuk menjalin kerjasama pada ketiga sektor tersebut. Sering kali terjadi masalah transnasional pada ketiga bidang tersebut yang kemudian mampu untuk merambat ke sektor lainnya, seperti politik, ekonomi maupun sosial-budaya.

Kebutuhan untuk menyelesaikan tiap permasalahan yang terjadi di setiap negara pada umumnya, mau tidak mau negara tersebut harus berkoordinasi dengan negara lain untuk membantu menyelesaikan masalah tersebut. Sehingga masalah tersebut tidak berlarut-larut sehingga akan menyebabkan permasalahan yang lebih serius.

Adanya kerjasama antar parlemen sedunia ini diharapkan mampu untuk membuat suatu kebijakan atau keputusan yang dapat digunakan di seluruh negara anggota dan tentunya membawa pengaruh positif atas kebijakan-kebijakan yang dihasilkan pada setiap pertemuannya.

2. Konsep Organisasi Internasional

Ada berbagai kriteria yang dapat dipergunakan untuk mengklasifikasi organisasi internasional. Menurut A. Le Roy Bennet kriteria siapa yang menjadi anggota organisasi internasional dibedakan menjadi organisasi internasional publik dan organisasi internasional privat¹³. Organisasi internasional publik adalah organisasi internasional yang beranggotakan negara atau antar pemerintah misalnya : Perserikatan Bangsa-Bangsa.(PBB)

Adalah sulit untuk memberikan definisi mengenai organisasi internasional publik yang bisa diterima secara universal. Untuk memberikan definisi perlu ditempuh melalui penyajian ciri karakteristik organisasi internasional publik sebagai berikut :

¹³ Mohd. Burhan Sani, *Hukum dan Hubungan Internasional*, Liberty, Yogyakarta, 1990. hal.96

1. organisasi internasional merupakan organisasi permanen, yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi yang berkesinambungan;
2. organisasi internasional dibentuk atas dasar perjanjian internasional, yang biasanya memuat : tujuan, struktur dan tata kerja organisasi;
3. organisasi internasional mempunyai tujuan dan fungsi yang pasti;
4. organisasi internasional adalah sifat sukarela;
5. organisasi internasional mempunyai organ konferensi perwakilan konsultatif yang luas, seperti organ pleno dan badan subsider;
6. organisasi internasional mempunyai sekretariat tetap;
7. organisasi internasional dibentuk menurut hukum internasional.

Sedangkan organisasi privat adalah organisasi internasional yang tidak memenuhi persyaratan sebagai organisasi internasional publik. Organisasi internasional privat dibedakan lagi menjadi organisasi internasional non pemerintah dan perusahaan internasional. Organisasi internasional non pemerintah adalah organisasi internasional yang dibentuk oleh individu atau assosiasi individu, misalnya : Fedcrasi Tenis Meja Internasional, Institut

Hukum Internasional dan Kamar Dagang Internasional. Karena diinginkan kerjasama yang lebih informal, ada organisasi internasional publik yang dibentuk dengan status organisasi internasional non pemerintah, yaitu Organisasi Polisi Internasional.

Berdasarkan kriteria sistem keanggotaan, organisasi internasional dapat diklasifikasikan menjadi organisasi internasional yang bersifat universal dan organisasi internasional tertutup. Organisasi internasional yang bersifat universal adalah organisasi internasional yang keanggotaannya terbuka bagi semua negara.

Sedangkan organisasi internasional yang tertutup adalah organisasi internasional yang keanggotaannya terbatas pada kelompok negara tertentu. Organisasi internasional semacam ini dibedakan lagi menjadi organisasi regional, organisasi negara dengan latar belakang yang sama dan organisasi fungsional. Organisasi internasional yang regional adalah organisasi internasional yang menekankan pembatasan keanggotaan pada kawasan tertentu dalam arti geografis dan politis.

Organisasi internasional dengan latar belakang yang sama yaitu organisasi internasional yang pembatasan keanggotaannya ditekankan pada kesamaan latar belakang, misalnya sistem politik, kepentingan ekonomi, tingkat perkembangan, bahasa atau kebudayaan. Kebanyakan organisasi

regional juga merupakan organisasi negara dengan kesamaan latar belakang. Organisasi fungsional adalah organisasi internasional yang pembatasan keanggotannya ditekankan pada fungsi yang spesifik ingin dicapai atau dilaksanakan”.

Dari pengklasifikasian organisasi internasional di atas, IPU dapat dikatakan sebuah organisasi internasional publik karena mempunyai ciri karakteristik yang sama dengan organisasi internasional publik. Tapi IPU juga merupakan organisasi privat karena termasuk organisasi non pemerintah karena keanggotaannya terdiri dari anggota parlemen negara.

F. Hipotesa

Sebagai sebuah organisasi internasional, IPU berupaya dalam menyelesaikan masalah transnasional dengan cara :

1. Memberi perhatian terhadap masalah-masalah transnasional yang terjadi di negara anggotanya.
2. Mengeluarkan resolusi-resolusi dan bekerjasama dengan masyarakat, individu, pemerintah, lembaga swadaya masyarakat dan berbagai organisasi internasional untuk bersama-sama berupaya menyelesaikan masalah transnasional tersebut.

G. Jangkauan Penelitian

Dalam penulisan ilmiah, jangkauan penelitian menjadi hal yang sangat penting karena sebagai pembatas terhadap fokus observasi dan penelitian. Tanpa dilakukannya pembatasan ini maka kajian akan menjadi melebar dan cenderung untuk menjadi luas. Dalam hal ini yang digunakan oleh penulis untuk memberikan sebuah batasan penelitian adalah dari periode waktu.

Periode waktu yang diambil penulis untuk melakukan penelitian adalah antara tahun 1989, 1992, 1994, 1995, 1996, 1998, 1999, 2000, dan 2001 dimana pada tahun-tahun tersebut diselenggarakannya Konferensi IPU yang membahas masalah terorisme internasional dan perdagangan gelap obat-obat terlarang, masalah imigran ilegal, dan epidemi HIV/AIDS. Alasan yang melatarbelakangi dipilihnya waktu ini sebagai jangkauan penelitian adalah terkait dengan tujuan penulisan yang telah disampaikan sebelumnya, yaitu terkait dengan upaya menyoroiti bagaimana IPU berperan dalam upaya menyelesaikan masalah-masalah transnasional.

H. Metode Pengumpulan Data

Dalam setiap penulisan ilmiah proses untuk mengumpulkan data dan fakta sangat mempengaruhi hasil akhir dari sebuah penelitian. Tanpa

menggunakan metode yang tepat maka validitas penelitian tersebut pun dapat dipertanyakan.

Langkah yang diambil penulis dalam proses pengumpulan data adalah dengan menggunakan data sekunder, yaitu metode studi pustaka. Sumber yang digunakan antara lain buku, makalah ilmiah, jurnal ilmiah, surat kabar, data internet dan literatur lain yang dianggap relevan.

I. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini akan dijelaskan tentang garis besar penulisan skripsi secara metodologis yang terbagi kedalam beberapa bagian, yaitu : alasan pemilihan judul; tujuan penulisan; latar belakang masalah; rumusan masalah; kerangka berfikir; hipotesa; jangkauan penelitian; metode pengumpulan data; dan sistematika penulisan.

BAB II IPU dan Kedudukannya Dalam Sistem Internasional

Bab II ini akan menjelaskan tentang gambaran umum subjek bahasan, yaitu IPU. Ada beberapa poin penting yang disampaikan dalam bab ini, yaitu sejarah singkat IPU; perkembangan IPU; stuktur organisasi IPU yang meliputi *The Assembly, The Governing Council, Executive*

Committee, dan *Secretariat*. Serta kedudukan IPU didalam dinamika organisasi internasional.

BAB III Masalah-Masalah Transnasional yang Dihadapi IPU

Pada Bab III pembahasan akan mengacu kepada masalah-masalah transnasional yang terjadi di beberapa negara. Seperti masalah terorisme internasional, perdagangan gelap obat-obat terlarang, masalah imigran illegal, dan epidemi HIV/AIDS.

BAB IV Peran Strategis IPU Dalam Upaya Menyelesaikan Masalah-Masalah Transnasional

Pada Bab IV ini akan menampilkan resolusi-resolusi yang dihasilkan pada setiap Konferensi IPU terkait dengan masalah-masalah transnasional tersebut. Poin-poin tersebut dimunculkan sebagai upaya menarik benang merah antara permasalahan yang muncul dengan hipotesa

BAB V Kesimpulan

Bab V ini adalah sebagai penjelasan akhir atas keterkaitan antara persoalan yang muncul dengan berdasar kepada teori dan konsep yang relevan sebagaimana digunakan dalam kerangka berpikir.